

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Agus Yudha Hernoko (2014), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi (2020), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Habib Adjie (2015), *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja (1982), *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- M. Yahya Harahap (2016), *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao (2019), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady (2015), *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, M. (2020), *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Setiawan (2020), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- R. Subekti (2011), *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Salim H.S. (2019), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno (2016), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto (2012), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Candra Irawan (2016), "Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3.
- Djumikasih & S. Tulus (2022), "Keabsahan Perjanjian dan Akibat Hukum Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Di Bawah Tangan," *Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1.
- Edi Sahputra Siregar (2023), "Prinsip dan Tantangan Fiqh Muamalah di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 9, No. 1.
- Hermansyah (2018), "Konsep Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2.

Yusuf, A. (2021), "Implementasi Perjanjian Syariah dalam Perbankan Modern," *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1.

Richard Cisanto Palit (2015), "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan," *Lex Privatum*, Vol. 31, No. 2.

Ridwan Khairandy (2016), "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 15, No. 2.

Tesis / Disertasi

Annisa Widyasti (2024), Akibat Hukum Terhadap Akad Perjanjian Musyarakah yang Dibuat Notaris yang Belum Memiliki Sertifikat Syariah. *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dona Febriano (2021), Akibat Hukum Alih Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kepada Pihak Ketiga Secara Di Bawah Tangan Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Pontianak. *Tesis*, Universitas Tanjungpura.

Ervin Oktavia Nurbaya (2017), Kekuatan Hukum Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Oper Kredit KPR) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fadhillah Retya Zakiy Putra (2020), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Proses Take Over yang Dilakukan di Bawah Tangan pada Perjanjian Kredit Kendaraan Mobil di BTN Syariah Cabang Semarang. *Tesis*, UIN Walisongo Semarang.

Farida Sutarsih (2008), Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ismail (2025), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Proses Take Over yang Dilakukan di Bawah Tangan pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri. *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung.

Moh. Ali Wafa (2021), Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Oper Kredit (Over Kredit) Jual Beli Rumah KPR Bersubsidi Tanpa Sepengetahuan Bank di Kabupaten Gresik. *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rusdi Duila (2018), Analisis Akad-Akad Pada Pembiayaan Take Over KPR Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. *Tesis*, Fakultas Syariah IAIN Jember.

Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/Pdt.G/2019/PT DKI.

Putusan PN Semarang Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Unr.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1984.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3675 K/Pdt/1990.

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 130/Pdt.G/2012/PN Malang.

Peraturan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah